



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 07 Maret 2020

Halaman: 9

Taman Parkir ABA Akan Dihilangkan

Terkait Usulan Yogya Sebagai Warisan Dunia ke UNESCO

TAK LAGI TERPUSAT

- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengusulkan Yogya sebagai Warisan Dunia ke UNESCO
- Salah satu peninggalan adalah tak ada lagi parkir terpusat di Abu Bakar Ali (ABA)
- Bangunan di taman parkir ABA tidak permanen
- Perencanaan membutuhkan waktu 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun
- Rencana untuk membongkar ABA tidak dilaksanakan tahun ini. Disbud DIY masih perlu diskusi
- Gubernur DIY menyatakan rencana pembongkaran ini, namun dicari ganti yang tidak jauh
- Pengelolaan Masjid harus tetap hidup agar orang tidak massal ke situ

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY merencanakan area parkir tidak akan lagi terpusat di taman parkir Abu Bakar Ali (ABA). Nantinya, ada kemungkinan untuk membongkar ABA lantaran terkait dengan usulan Yogya sebagai warisan dunia ke UNESCO.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Aris Eko Nugroho menjelaskan, salah satu janji yang dikirimkan kepada UNESCO menyangkut tidak adanya lagi parkir terpusat yang saat ini digunakan bagi pemilik kendaraan bermotor bahkan bus pariwisata. Sehingga, area parkir tidak akan lagi terpusat di ABA.

"Parkir itu (ABA), sementara, tidak permanen. Bangunan itu tidak diperuntukkan permanen berada di situ. Dari awal izin dari DP2WB (Dewan Per-

● ke halaman 15

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

Taman Parkir ABA

• Sambungan Hal 9

timbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah) DIY yakni ABA sifatnya sementara," ujarnya kepada *Tribun Jogja*, Jumat (6/3).

Ia menjelaskan bahwa penghilangan fungsi taman parkir ABA sebagai area parkir membutuhkan proses dan ada tahapan yang tidak dilakukan tahun ini. Ketika disinggung mengenai waktu pasti pembongkaran akan dilakukan, Aris tidak bisa menyebutkan detailnya karena perlu melalui serangkaian diskusi. Meski demikian, janji tersebut akan ditagih UNESCO karena menjadi bagian perencanaan Yogyakarta sebagai Warisan Dunia.

"Kami gambarkan ada

perencanaan yang membutuhkan waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Salah satunya ABA tidak bersifat permanen. Membongkar (ABA) tidak tahun ini. Tapi kapannya itu perlu diskusi, karena pengajuan UNESCO sampai saat ini belum dikasih waktu lagi dari pihak pusat," ujarnya.

Aris menuturkan bahwa pihaknya sudah mengirimkan dokumen ke UNESCO di tahun 2019. Pada perkembangannya, Pemda DIY diminta melakukan penyempurnaan. "Pusat memberikan koreksi, kami tunggu pusat mau yang mana dulu. Kalau dari pusat difokuskan satu negara satu Warisan Dunia. Kalau saingan kita saat ini adalah Kebun Raya Bogor," ujarnya.

Aris mengatakan bahwa keuntungan dinobatkannya Yogyakarta sebagai Warisan Dunia adalah bisa menjadi

perhatian seluruh dunia. Selain itu anak cucu kita di kemudian hari bisa melihat Yogya menjadi bagian warisan budaya dunia.

"Kalau tidak jadi warisan dunia, nanti bangunan seadanya, kita tidak bisa mengendalikan fasadnya bagaimana, dan kita jamin anak cucu kita nanti masih bisa melihatnya ada karena janji kami pada dunia bukan pada penguasa yang ketika ganti penguasa ganti kebijakan terkait ini," ujarnya.

Dibongkar

Kepala Dinas Perhubungan DIY Tavip Agus Rayanto membenarkan Taman Parkir ABA yang akan dibongkar terkait dengan pengajuan Yogyakarta sebagai Warisan Dunia ke UNESCO.

"Itu prinsipnya non permanen, dibongkar. Pak Gubernur siap dibongkar tapi

harus cari ganti. Jangan terlalu jauh. Pedestrian harus tetap hidup agar orang tidak malas ke situ," ucapnya.

Uji coba Malioboro semi pedestrian yang digelar setiap Selasa Wage terus dilakukan. Berbagai atraksi masih menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dengan berjalan kaki maupun kendaraan non-motor untuk membiasakan suasana Malioboro yang nantinya akan menjadi full pedestrian.

"Rencananya tambah juga setiap Kamis Pahing. Ini agar saat full pedestrian mereka nggak kaget. Termasuk menguji dampak arus akan pindah ke sebelah mana. Kalau ABA transisional. Komitmen dengan UNESCO. Kalau sudah siap kantong parkir itu akan dibongkar. Tidak hanya ABA, tapi Ngabean juga jadi taman publik," pungkasnya. (kur)

Perlu Dikaji Ulang

ANGGOTA Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid meminta Pemda DIY mengkaji ulang rencana pembongkaran Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA). Menurutnya hal tersebut justru akan menambah persoalan, mulai dari persoalan lalu lintas, sosial ekonomi hingga anggaran yang terbuang "percuma".

"Itu kan baru dua tiga tahun. Artinya kajian dulu, apakah harus dibongkar. Kalau dibongkar, berarti kegagalan

an perencanaan pemerintah membangun itu. Harusnya berpikirnya input, output, benefitnya. Itu kan nggak berimbang. Kalau misalkan sementara, jangan dibuat seperti ini," ujarnya pada *Tri-*

• ke halaman 15

Perlu Dikaji Ulang

• Sambungan Hal 9

bun Jogja, Jumat (6/3).

Yazid menegaskan bahwa kajian sangat penting dilakukan. Hal ini untuk menghindari berbagai masalah yang akan berpengaruh terhadap masyarakat serta wisatawan yang akan berkunjung ke Malioboro dan sekitarnya.

"Jangan gampang sekali membongkar bangunan yang habis puluhan miliar.

Pikirkan akses sosiologis bagaimana karena itu dulu untuk menampung tukang parkir yang beroperasi di Malioboro. Kalau kemudian dibongkar, berapa tenaga kerja yang harus nganggur," ujarnya.

Ia kembali mengingatkan agar pemerintah jangan terburu-buru melakukan pembongkaran karena harus ditinjau aspek perencanaan. "Kalau iya, berarti kegagalan perencanaan. Tenaga kerja yang harus menganggur seperti apa. Dulu ABA tidak hanya untuk lapangan

kerja tapi solusi ketika parkir di jalanan Malioboro dilarang," ujarnya.

Ia meminta agar Pemda DIY dalam pengajuan Warisan Dunia tersebut juga memperhatikan terkait warisan budaya fisik di Malioboro yang harus dipertahankan. Ia menyebutkan contoh adalah Gedung DPRD DIY. "Misal kantor DPRD. Ini sejarahnya panjang bahkan DPR RI pernah ngantor di situ. Bagaimana mempertahankan ini dan agar tidak merubah bentuk yang ada," tutupnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005